

PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU TAHUN 2019

1. Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU Tahun 2019

Pagu alokasi anggaran Kejaksaan Tinggi Bengkulu TA 2019 sebesar Rp. 18.980.776.000 (Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Riburupiah) yang mengalami penurunan sebesar Rp. 6.797.233.000,- (Enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) jika dibandingkan dengan TA 2018. Pada TA 2019 ini, terdapat Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Bidang.

Program/Kegiatan Prioritas Nasional Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada Tahun 2019

No	Program/Kegiatan/Proyek	Target Dan Satuan	Pagu
III	Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam		432.601
	Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)	20 kegiatan	156.000
	JUMLAH		432.601

Rincian Prioritas Bidang Pagu Anggaran Kejaksaan RI Tahun 2019

No	Program/Kegiatan/Proyek	Target Dan Satuan	Pagu
II	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI		238.700
	1. Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	20 laporan pengaduan	68.000
	2. Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan	7	70.700

	Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	laporan pengaduan	
	3. Pelaksanaan Inspeksi	10 Kegiatan	100.000
IV	Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam		432.601
	2. Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)	20 kegiatan	156.000
V	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum		643.000
	1. Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	220 perkara	550.000
	2. Pelaksanaan eksaminasidan ekstradisi Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 perkara	75.000
	3. Perkara Pidana Umum Tertentu Yang Diselesaikan Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1. perkara	18.000

Rincian anggaran yang dapat disusun Per Program berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran TA 2019 yaitu :

1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 18.980.776.000,- (*delapan belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*). Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. .11.752.390.000,- (*Sebelas milyartujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus Sembilan pulh ribu rupiah*) yang sudah termasuk tunjangan fungsional Jaksa dan tunjangan kinerja pegawai Kejaksaan RI.

2. Belanja barang operasional untuk kebutuhan Kejaksaan Tinggi Bengkulu sebesar Rp.2.655.295.000,- (*Dua milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) antara lain untuk kebutuhan pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan peralatan dan mesin, langganan daya dan jasa, honorarium pramubhakti dan satpam, honorarium pengelola keuangan, perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, seragam pegawai dan kebutuhan sehari-hari perkantoran.
3. Belanja barang non operasional sebesar Rp.2.073.091.000,- (*Dua milyar tujuh puluh tiga juta Sembilan puluh satu. ribu rupiah*) antara lain untuk kegiatan layanan dukungan manajemen, peningkatan pengawasan apratur Kejaksaan di Daerah ,penyelidikan/Pengamanan /Penggalangan Permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam, Penanganan perkara pidana, Penanganan perkara Tindak Pidana korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya, Penanganan dan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp 2.500.000.000,- (*Dua milyar limaratus juta rupiah*), dengan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2019 yaitu pengadaan sarana dan prasarana meubelair IT dan mesin

3) Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan sebesar Rp. 238.700.000,-(*Dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*) dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

- Jumlah Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi sebanyak 20 (*Dua Puluh.*) dan Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus sebanyak 7 (*Tujuh.*) laporan.
- Pelaksanaan Inspeksi Umum sebanyak 10 (*Sepuluh*) kegiatan;

4) Program Penyelidikan /Pengamanan /Penggalian Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program tersebut sebesar Rp. 432.601.000,- (*Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Seribu rupiah*) dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Tusi Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalian di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalian sebanyak 3 (*Tiga*) Laporan yang sudah termasuk Posko Bandara, Posko Kantor Pos dan Posko Pelabuhan.
 - Kegiatan Pelacakan Aset terkait tindak pidana sebanyak 2 (*dua*) kegiatan.
- b. Kegiatan Tusi Penerangan Dan Penyuluhan Hukum dengan indikator kegiatan yang akan dicapai adalah :
 - Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan Dan Penerangan Hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana dengan rincian kegiatan :
 - Lembaga yang diberi Penerangan Hukum sebanyak 3 (*tiga*) Kegiatan;
 - Kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) sebanyak 20 (*dua puluh*) kegiatan yang merupakan kegiatan Proyek Prioritas Nasional.
 - Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) sebanyak 3 (*tiga*) Kegiatan.
 - Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat sebanyak 1 (*satu*) Kegiatan.

5) Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum adalah Rp. 643.000.000,- (*enam ratus empat puluh tiga juta rupiah*.) dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

- 220 (*dua ratus dua puluh*) perkara ditingkat Pra Penuntutan dan Penuntutan dan Eksekusi. Dengan volume target tersebut, telah tersedia kegiatan pengiriman terdakwa dan Barang Bukti (tahap II) dari Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri ke Lembaga Pemasyarakatan dan biaya antar jemput terdakwa untuk disidangkan ke Pengadilan serta transport lokal sidang Jaksa untuk 1 (*satu*) tahun.
- Kegiatan Tusi Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu yang diperuntukkan untuk penanganan perkara Tindak Pidana Perikanan (*illegal fishing*) /perkara Kehutanan yang memerlukan biaya tinggi/ Mineral dan Batubara adalah 1 (*satu*) perkara di tingkat Penuntutan dan Eksekusi.

6) Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat Dan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat Dan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah rupiah*).

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah :

- Jumlah Penyelidikan perkara Tindak Pidana Korupsi sebanyak 2 (*dua*) perkara.
- Jumlah Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi sebanyak 2 (*dua*) perkara.
- Jumlah Pra Penuntutan dan Penuntutan perkara Tindak Pidana Lainnya sebanyak 4 (*empat*) perkara.
- Jumlah Pra Penuntutan perkara tindak pidana khusus lainnya sebanyak 2 (*dua*) perkara.
- Jumlah Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi/Tindak Pidana Khusus Lainnya yang terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan sebanyak 1 (*satu*) perkara.

7) Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara sebesar Rp.60.345.000,- (*enam puluh juta tiga ratus empat puluh limaribu rupiah*).

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah :

- terselesaikannya Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi sebanyak 3 (*tiga*) perkara.
- terselesaikannya Pertimbangan Hukum/Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi sebanyak 6 (*enam*) perkara.
- Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis dengan volume output 1 (*satu*) satker.